

TAJUK RENCANA

Mengurangi Kemiskinan DIY

TERNYATA untuk bisa hidup layak di Yogyakarta, rumah tangga miskin (RTM) di DIY memerlukan pendapatan Rp 2 juta per bulan. Sedangkan tingkat pendapatan yang masuk garis kemiskinan DIY sebesar Rp 482.767/kapita. (KR 26/12). Maka bisa dibayangkan saat pandemi saat ini, berapa warga DIY hidup dengan pendapatan di bawah jumlah tersebut?

Angka kemiskinan di DIY tahun ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik DIY sebanyak 12,8%. Jika dilihat persentase per kabupaten/kota, maka 81.140 jiwa atau 12,8% tertinggi di Kulonprogo. Sedangkan urutan di bawahnya 17,69% atau 135.330 jiwa di Gunungkidul. Pada urutan ketiga adalah Bantul dengan 14,04% atau berjumlah 108.930 jiwa. Berikutnya di Sleman sebesar 8,64% dengan 108.930 jiwa. Dan di Kota Yogyakarta 7,69% atau 34.070 jiwa.

Dari data tersebut tergambar, ada 3 klaster profil kemiskinan. Klaster indikator tinggi yakni Kulonprogo dan Gunungkidul, indikator rendah Sleman dan Kota Yogyakarta, sedang Bantul berada di tengah-tengah. Berkaitan hal ini Gubernur DIY Sultan HB X mengatakan, bahwa kemiskinan dan ketimpangan wilayah bakal menjadi prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY tahun 2023. Selain juga akan mengatasi masalah kurangnya layanan infrastruktur ekonomi, dan masih rendahnya produksi UMKM. Pandemi Covid-19 makin memperparah penderitaan warga yang tidak punya penghasilan tetapi. Jangankan Rp 2 juta, untuk menghidupi keluarganya yang di bawah kemiskinan, belum tentu mereka punya pendapatan seperti itu.

Sebenarnya dana keistimewaan juga sudah digelontorkan. Sebagian bagian dana transfer pemerintah, diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi ekonomi kerakyatan. Bahkan menurut Sultan HB X, pengelolaan dana keistimewaan juga mengacu pada RPJMN dan RPJMD. Karena itulah tampaknya semua potensi yang dimiliki DIY harus dikerahkan untuk menanganai kemiskinan. Kolaborasi atau sinkronisasi pemba-

ngunan dari semua potensi yang dimiliki. Tentu ketika kemudian fokus menangani kemiskinan, pertama dilakukan adalah penelitian lebih cermat mengenai potensi masing-masing daerah, tentu beda dengan indikator kemiskinan daerah lain. Kasus dan cara menangani kemiskinan di Gunungkidul misalnya akan berbeda dengan Kulonprogo atau Bantul.

Dalam hal ini, Pemkab Gunungkidul misalnya sudah berupaya menurunkan angka kemiskinan dengan berbagai program, mulai dari pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga bantuan sosial. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat pada masa pandemi Covid-19. Namun peningkatan angka kemiskinan tidak bisa terhindarkan. Bantuan sosial pemerintah, tentu tidak cukup untuk mwegatasi Di Gunungkidul, misalnya paling mendasar adalah kesehatan sehingga menangani juga harus pasti. Salah satunya dengan pemenuhan layanan kesehatan melalui pembiayaan BPJS Kesehatan untuk keluarga miskin. Sektor pariwisata sebagai andalan bisa diharapkan untuk membantu mengangkat pendapatan.

Penanganan kemiskinan pada masing-masing daerah, memerlukan penajaman yang berbeda. Sangat mungkin masing-masing kabupaten/kota membentuk satgas untuk lebih terfokus pada 'pengobatan'-nya. Selanjutnya penanganan akan lebih menitik jika masuk pada tingkat kecamatan atau bahkan kelurahan. Dengan demikian akan tampak petanya dari mana harus memulai. Demikian juga akan ada evaluasi, untuk apa dan kemana Danais dalam rangka mengangkat kesejahteraan rakyat DIY.

Program DIY membangun dari pinggiran akan lebih terdorong jika kemudian desa juga menyelenggarakan program yang menggunakan dana desa. Apalagi setelah Bumdes diberi kekuatan hukum untuk bertusaha. Sinkronisasi seluruh sektor, tidak egois sektoral akan mampu mengurangi angka kemiskinan. Terlebih Gubernur sudah memberikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk mengurangi angka kemiskinan. (**)

Krisis Iklim dan Ekonomi Syariah

SEKRETARIS Jenderal PBB Antonio Guterres menegaskan, krisis iklim yang sedang terjadi sudah mencapai tingkat 'kode merah untuk kemanusiaan'. Tiap detiknya manusia membuang 1.000 ton karbon dioksida ke atmosfer. Angka ini mencapai 40 miliar ton pertahunnya, dan terus terakumulasi di atmosfer. Diekspektasikan bahwa hanya ada 200 miliar ton *budget carbon* yang tersisa. Atau lima tahun lagi yang bisa digunakan untuk menekan penggunaan karbon dioksida agar suhu bumi bisa di bawah 1,5 celcius.

Perlu dicatat, pemanasan 1,2 celcius yang terjadi sekarang sudah memiliki dampak luas dari kekeurangan, hujan ekstrem, hingga meningkatnya permukaan laut. Akankah kerusakan alam yang semakin parah dan tak layak ditinggali ini menjadi warisan kita untuk generasi mendatang?

Kompromi

Pertemuan para pemimpin pada COP26 mengenai penanggulangan krisis ekologi November, sangatlah krusial. Akan tetapi, hasil dari COP26 dinilai penuh kompromi. *Political will* mengenai ketahanan ekologi masih minim demi kepentingan ekonomi. Pada dasarnya, ekonomi dan ekologi berasal dari satu akar kata yang sama yaitu 'oiko', berarti rumah. Sayangnya, kedua istilah tersebut sering mewakili kepentingan yang dibenturkan. Dalam ekonomi kapitalis, manusia diposisikan sebagai *homoeconomicus* yang terus berusaha memenuhi hasrat ekonomi. Hingga kepentingan *stakeholder* lainnya, diperlakukan sebagai eksternalitas.

Islam mengenalkan urgensi menjaga lingkungan hidup. Manusia diposisikan sebagai *khalifatul fil ard*, atau yang diamanahkan Allah untuk memimpin bumi. Perspektif ini menekankan, apa yang dimiliki manusia tidak lebih dari hak pakai yang harus dijaga dengan baik. Bukan sebaliknya. Hal tersebut ditegaskan konsep *Maqasid Syariah*

Ali Chamani Al Anshory

atau tujuan prinsip-prinsip syariah.

Melindungi kehidupan manusia (*hifz nafs*) dan kelangsungan keturunan (*hifz nasl*) menjadi dua elemen utama dari lima tujuan syariah. Nilai-nilai ini semestinya termanifestasikan pada ekonomi syariah.

Indonesia patut berbangga bahwa eko-

syariah dapat memberikan perhatian khusus pada pendanaan iklim.

Pendanaan ekonomi syariah masih cenderung berkecukut dengan *negative screening* atau menfilter investasi yang memiliki elemen *riba*, *gharar* dan *maysir*. Kedepannya, investasi instrumen ekonomi syariah perlu mengkomodifikasi *positive screening* atau mendorong pendanaan yang berdampak positif bagi *stakeholder*, termasuk pendanaan iklim.

Yang kedua, sinergi untuk menghadapi krisis iklim dapat menjadi agenda bagi institusi-institusi sosial ekonomi syariah seperti zakat dan wakaf dan pesantren. Perlu dicatat bahwa krisis iklim memiliki dampak ekonomi yang lebih serius kepada masyarakat rentan. Sehingga isu ini semestinya diangkat sebagai bagian *master plan* pengelola zakat dan wakaf.

Ekonomi eksploitatif memicu krisis alam dan ekonomi syariah perlu berkontribusi sebagai solusi. Memastikan harmoni dengan lingkungan hidup bukan hanya sekedar dorongan bagi ajaran Islam, tapi tanggung jawab dasar setiap manusia. Identitas ini adalah substansi ekonomi syariah yang harus terus bergerak sebagai *rahmatan lil alamin*, rahmat bagi seluruh alam.

***Ali Chamani Al Anshory,**
Anggota Masyarakat Ekonomi Syariah, Alumni of Islamic Finance, Durham University, United Kingdom.



KR-JOKO SANTOSO

nomi syariahnya terbaik ke-4 pada Global Islamic Economy Indicator (GIEI). Ambisi Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah perlu didukung, tapi jangan sampai ekonomi syariah malah gagal mengartikulasikan aspirasi *Maqasid* Syariah. Prosedur atau akad halal pada ekonomi syariah semestinya juga mengkomodifikasi konsep *tayyib* atau konsekuensi yang baik terhadap *stakeholder*, salah satunya pada lingkungan hidup.

Identitas

Terdepan dalam menanggulangi krisis alam semestinya menjadi identitas ekonomi syariah. Pada tingkatan praktis, hal ini setidaknya dapat terartikulasikan pada dua hal. Yang pertama, institusi-institusi komersial ekonomi

PIKIRAN PEMBACA

Naskah bisa dikirim Email atau WA

pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/Scan KTP

atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40 - 42 Yogyakarta 55323.

Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks.
Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Mengembangkan Potensi Anak

ANAK adalah anugerah Tuhan yang sangat berharga. Kehadirannya menyempurnakan kebahagiaan sekaligus menjadi harapan penerus kejayaan orang tua. Karena itu, anak merupakan amanat yang harus dijaga, dirawat, dan diasuh dengan baik. Dan tentu setiap orangtua pasti ingin anak mereka tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang berguna di masa depan. Melalui tulisan ini, sekelebat kita kembali mengingat pandangan para ahli berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak.

Secara garis besar, pendapat para ahli terbagi kepada tiga kelompok. Pertama, kelompok yang berpendapat bahwa perkembangan anak sangat ditentukan oleh faktor hereditas (pembawaan). Kelompok ini dikenal dengan nama mazhab nativisme. Menurut kelompok ini, pembawaan sangat dominan dalam membentuk karakter anak. Artinya, baik lingkungan, pengalaman maupun pendidikan yang diterima anak dari luar dianggap tidak berpengaruh apa-apa bagi perkembangannya.

Kedua, kelompok yang berpendapat bahwa perkembangan anak sangat ditentukan oleh pengalaman yang diperoleh dari luar. Kelompok ini dikenal dengan nama mazhab empirisme. Mazhab atau aliran empirisme sangat terkenal dengan doktrin tabula rasa. Setiap anak yang lahir dianggap seperti kertas kosong yang menunggu untuk diisi tulisan apa pun di atasnya. Oleh karena itu, aliran empirisme sangat bergantung dan menekankan arti pentingnya lingkungan, pengalaman, dan pendidikan yang diterima seorang anak.

Ketiga, kelompok yang menggabungkan pandangan aliran nativisme dan empirisme. Kelompok ini dikenal dengan na-

ma aliran konvergensi. Pandangan aliran konvergensi berpendapat bahwa perkembangan anak ditentukan oleh faktor hereditas dan lingkungan. Kedua faktor tersebut, hereditas dan lingkungan, sama pentingnya dalam mewarnai perkembangan anak. Dengan demikian, faktor bawaan dan sekaligus faktor lingkungan, pengalaman, dan pendidikan yang diterima anak dapat mempengaruhi perkembangan mereka.

Bagi orangtua terlebih lagi para pendidik, memahami ketiga pandangan para ahli di atas tentu sangat menolong mereka agar lebih bijak dalam menyikapi, membantu, dan membimbing perkembangan anak. Menilai dan membandingkan ketiga pandangan tersebut, sepertinya kita dapat sepakat bahwa pandangan aliran konvergensi yang memberikan perhatian pada faktor hereditas dan lingkungan merupakan pendapat yang lebih tepat dan lebih baik. Memanfaatkan pandangan terakhir ini, yakni aliran konvergensi, kita dapat melakukan ikhtiar bersama dalam merancang dan membina masa depan anak.

Pada dasarnya setiap anak sejak dilahirkan sudah membawa beragam potensi. Potensi tersebut ada yang positif dan ada yang negatif. Tugas orangtua dan pendidik antara lain menggalang dan mengembangkan potensi positif anak dan sedapat mungkin meminimalisir perkembangan potensi negatifnya. Hal ini perlu diupayakan sedini mungkin. Jangan sampai terjadi keterlambatan yang membuat kita menyesal di kemudian hari. Sebab berlangsungnya masa kanak-kanak, sebagaimana kita tahu, hanya sebentar saja.

DS Apandi
SD 1 Padokan,
Kasihnan, Bantul.

Mitigasi Alih Fungsi Lahan Pertanian di DIY

MITIGASI adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Ancaman bencana yang disebabkan krisis 3F (*fuel, finance, food*) khususnya kelangkaan pangan masih berpotensi terjadi seiring bertambahnya populasi penduduk, konversi lahan, degradasi lahan dan air, perubahan iklim dan kerusakan lingkungan.

Alih fungsi lahan pertanian menjadi permasalahan dan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan keamanan pangan di Indonesia, termasuk di DIY. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian khususnya di kawasan perdesaan. Sebagai upaya mitigasi bencana pangan, Pemerintah RI telah mengeluarkan regulasi melalui UU No 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).

Menindaklanjuti UU tersebut, Pemda DIY telah mengeluarkan Perda Nomor 10 tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di DIY. Perda memuat rumusan bahwa setiap kabupaten di DIY harus memiliki lahan pertanian pangan berkelanjutan, mencakup kawasan pertanian lahan basah dan lahan kering. Implementasi Perda LP2B DIY (Pasal 9) semula mencakup area seluas 35.911,59 ha, akan dikembangkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). Terdiri atas lahan pertanian beririgasi dan tidak beririgasi dengan luas 104.905,76 ha, terbagi menjadi lahan inti 72.409,79 ha dan lahan cadangan 32.495,97 ha (Perda DIY No 5/2019).

Petani Gurem

Luas lahan sawah di DIY (BPS, 2019) mencapai 78.272 ha. Alih fungsi lahan pertanian di DIY periode 2013-2017 sebesar

Sinung Rustijarno

0,4%/tahun atau 237,14 ha/tahun (BPS DIY, 2017). Lahan sawah seluas 237,14 ha dengan rata-rata IP 2,23 dan rata-rata produktivitas padi 6,20 ton GKP/ha/MT dapat menghasilkan padi sebanyak 2.733,78 ton-GKG atau setara dengan 1.750,16 ton beras. Konsumsi beras di DIY sebesar 82,20 kg/kapita/tahun, akibat konversi lahan potensi pemenuhan kebutuhan pangan setara 21.291 orang dapat hilang sia-sia.

Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) DIY 2018 sebanyak 480.877, turun 14.524 RTUP (2,93%) selama periode 2013-2018. Rata-rata kepemilikan lahan di DIY < 0,5 ha sebanyak 438.105 RTUP (88,73%), didominasi petani gurem (Sutas BPS DIY, 2018).

Penguasaan lahan pertanian DIY yang semakin sempit ini sesuai hasil Sensus Pertanian tahun 2003 (83,77%) dan 2013 (85,71%) lahan dikuasai petani gurem. DIY adalah kota wisata, kota pelajar, kota budaya dan kota kuliner. Penyebab berkurangnya lahan produktif didorong naiknya kebutuhan masyarakat untuk pemukiman. Selain tingginya biaya penyelenggaraan pertanian, kurangnya minat generasi muda mengelola pertanian. Konversi lahan pertanian menjadi kompleks perumahan, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan sarana publik dapat menimbulkan dampak negatif. Terutama turunnya kesempatan kerja dan pendapatan petani.

Regulasi

Strategi pengendalian alih fungsi lahan dilakukan melalui regulasi, akuisisi dan manajemen serta insentif dan *charges*.

Dalam pendekatan regulasi, pemerintah menetapkan aturan dan izin dalam pemanfaatan lahan yang ada, berdasarkan pertimbangan teknis, ekonomis dan sosial. Akuisisi dan manajemen menyempurnakan sistem dan aturan jual beli lahan dan *land tenure* (hak pemangkuhan lahan). Insentif dan *charges* melalui pembebasan PBB lahan pertanian produktif, dukungan pemerintah untuk produksi pangan (infrastruktur, pupuk, bibit, alsintan). Juga pembandingan teknologi, akses target pasar dan stabilisasi harga komoditas.

Optimasi lahan pertanian pangan dilakukan intensifikasi (peningkatan produktivitas), ekstensifikasi (perluasan areal) dan diversifikasi (*mix-cropping*). Mitigasi alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan perlu dilakukan untuk mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan.

***Sinung Rustijarno SPi MSI,**
Peneliti Sosial Ekonomi Pertanian pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Yogyakarta.

Pojok KR

Bank Indonesia optimis, pemulihan ekonomi DIY akan berlanjut 2022.
-- Perlu dukungan semua pihak.

Hadapi liburan, Parangtritis perlu dukungan sarana dan prasarana.
-- Ketimbang ada penyesalan kemudian.

PSIM siap maksimalkan peluang ke liga 1.
-- Semangat!..

Beraba

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfi MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussyahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afriati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hastho Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrky2@yahoo.com, iklankrky13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu' Rp 90.000,00, Iklan Umum/Diagram Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarang...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) Rp 12.000,00/baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi Di s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm), Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) 563125, Telp (0274) 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan Raya Yogyakarta - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) 496549 dan (0274) 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan: H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP. **Banyumas:** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Kepala Biro: Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro: Sri Warsiti. **Magelang:** Jalan Ahmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro: Drs M Thoha. **Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd Kepala Biro: Asrul Sani. **Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.